

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Keterbatasan pemerintah dalam beberapa hal menjadi salah satu faktor perlunya keterlibatan pihak swasta ataupun *civil society* yang meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Organisasi Sosial, Organisasi Massa, Organisasi Profesi, Organisasi Keagamaan, Serikat Buruh, dan lain-lain untuk turut andil berperan demi mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Pandemi COVID-19 yang sedang melanda diberbagai negara khususnya di Indonesia, memerlukan penanganan yang luar biasa dan tidak dapat disepelekan. Oleh karena itu dalam upaya penanganan COVID-19 diperlukan kerja sama yang sinergis oleh berbagai pihak. Dengan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, dalam hal ini Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912/8 Dzulhijah 1330 di Yogyakarta telah banyak berkontribusi untuk negri ini. Kiprah Muhammadiyah sudah tidak dapat diragukan lagi, hal ini telah dibuktikan melalui totalitas Muhammadiyah melalui gagasan, material hingga totalitas juang pada masa kemerdekaan hingga sekarang. Bukti kongrit kontribusi Muhammadiyah yaitu dengan pergerakan Muhammadiyah yang terjun diberbagai bidang, baik di bidang sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Hingga awal tahun 2020 Muhammadiyah memiliki 457 Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah, 185 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Panti Asuhan), 23.772 Amal Usaha Pendidikan, Koperasi 568, Pendampingan dan pemberdayaan ekonomi melalui BUEKA (Bina Umat Keluarga 'Aisyiyah) sebanyak 1.426 buah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari sabang-merauke ([www.aisyiyah.or.id](http://www.aisyiyah.or.id), 2020). Muhammadiyah sendiri merupakan penyumbang lembaga pendidikan terbanyak di Indonesia hingga mampu mengungguli Lembaga Pendidikan yang dimiliki pemerintah.

Dengan menilik pada kontribusi yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah sebelumnya, Muhammadiyah sangat berpengaruh dalam perkembangan dan kemajuan negeri ini. Harapannya dengan jumlah anggota kurang lebih 50 juta jiwa, Muhammadiyah dapat berkontribusi penuh dalam upaya penanganan pandemik COVID-19. Penerbitan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/MLM/I.0/H/2020 tentang Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Pembina

Kesehatan Umum (MPKU) dan Muhammadiyah *Disaster Management Center* (MDMC) telah berkolaborasi guna membentuk Muhammadiyah COVID-19 *Command Center* (MCCC) pada tanggal 5 Maret 2020. Dalam hal ini MCCC bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program dan aksi penanganan COVID-19 di Indonesia yang berupa pelayanan, pencegahan, penanganan, dan peran di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan. Muhammadiyah dalam proses percepatan dan penanganan COVID-19 dibidang kesehatan telah menyiapkan beberapa Rumah Sakit yang siap berkontribusi menangani COVID-19. Dalam diskusi online yang rutin dilaksanakan oleh MCCC, dr. Asral Hasan, MPH sebagai Kasubdit Gawat Darurat Kementerian Kesehatan RI menyebutkan bahwasannya Muhammadiyah telah menyiapkan 72 Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah (RSMA) yang siap menangani pasien COVID-19, akan tapi hingga 01 Mei 2020 baru terdapat 9 RSMA yang telah ditetapkan menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 oleh gubernur di beberapa daerah (Media MCCC, 2020). Dalam proses pengumpulan dana (*fund raising*) dari masyarakat guna penanganan COVID-19, RSMA bekerjasama dengan Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Menurut survey yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Survey dan Pembangunan (LKSP) pada tanggal 20-27 Mei 2020 dengan jumlah 2.047 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia terkait hasil persepsi publik mengenai organisasi masyarakat yang peduli dengan kepentingan warga di masa pandemi COVID-19 menyatakan bahwasannya Muhammadiyah menempati posisi tertinggi dengan presentase 17,26% disusul Ikatan Dokter Indonesia (16,51%), Nahdlatul Ulama (12,55%) dan masih banyak organisasi lainnya. Pada pemuan ini diketahui bahwasannya Muhammadiyah dalam menangani COVID-19 dengan dibentuknya tim khusus MCCC telah merawat pasien positif COVID-19 di lebih dari 50 RSMA diseluruh Indonesia hingga terdapat 417 pasien positif yang dirawat di RS Muhammadiyah, juga 2.201 PDP dan 3.404 ODP (kumparanNEWS, 2020).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai badan kesehatan dunia di bawah naungan PBB, pada tanggal 11 Maret 2020 menyatakan status pandemi terkait penemuan kasus virus varian baru dari golongan Virus Corona yang bernama 2019 Novel Corona Virus (2019-nCov) atau Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Menurut WHO status pandemi lebih tinggi levelnya dibandingkan epidemi. Pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia dan tidak berkaitan dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya (World Health Organization, 2020). Virus golongan ini sebelumnya pernah ada pada tahun 2002 dengan nama *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan pada tahun 2012 dengan nama *Middle East respiratory syndrome coronavirus* (MERS-CoV). Pada akhir

bulan Maret 2020 WHO menyatakan kurang lebih ada 169 negara dan wilayah yang dinyatakan terserang wabah Covid-19 (Kuncahyono, 2020). Dengan adanya pandemik COVID-19 akan berdampak terhadap banyak sektor, baik sosial, ekonomi, pendidikan dan agama. Dampak polemik COVID-19 terjadi secara global dan serentak diberbagai negara yang terpapar virus ini dengan kurun waktu yang tidak dapat ditentukan, hal ini dikarenakan obat ataupun vaksin COVID-19 yang belum dapat ditemukan.

Tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) memprediksi COVID-19 telah masuk ke Negara Indonesia sejak minggu ke-3 bulan Januari 2020 yang didasarkan pada laporan kasus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) di salah satu daerah, hal ini jauh sebelum Presiden mengumumkan kepada khalayak umum dengan adanya temuan dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Depok positif COVID-19 pada awal bulan Maret 2020 (detikNews, 2020). Pandemi COVID-19 yang merambah di Indonesia ini dinyatakan sebagai bencana (*disaster*) nonalam sesuai dengan Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Adapun macam-macamnya bencana dikategorikan menjadi beberapa kategori, di antaranya bencana alam, non alam dan sosial. Pada kasus COVID-19 ini masuk ke dalam kategori nonalam yang berupa wabah. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Penanganan pandemi COVID-19 diperlukan kolaborasi sinergis antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat untuk dapat mematuhi segala kebijakan yang telah ditentukan untuk menekan penyebaran virus ini. WHO merekomendasikan untuk menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Adapun upaya pemerintah Indonesia dalam rangka mencegah perluasan penyebaran COVID-19 yaitu diantaranya dengan melalui himbauan untuk menjaga jarak sosial (*social distancing*) dan penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 tahun 2020 yang menetapkan PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pernyataan tersebut memicu beberapa wilayah di Indonesia berlomba-lomba untuk melakukan karantina wilayah (*lock down*), terutama daerah dengan angka penemuan kasus COVID-19 yang relatif tinggi. Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut masyarakat dihimbau untuk menjalankan segala aktifitasnya di rumah (*stay at home*) bekerja, belajar, dan beribadah dari

rumah. Dalam melakukan penerapan kebijakan tersebut tentu akan akan berdampak positif dan negatif dikalangan masyarakat. Dampak positif dari segenap kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah bukan lain hanya untuk percepatan penanganan COVID-19 serta menekan resiko penyebarannya. Adapun dampak negatif dari penerapan kebijakan pemerintah tersebut menuai berbagai kendala baru dikalangan masyarakat yang diantaranya: kendala yang *pertama* dalam urusan pekerjaan ada beberapa sector pekerjaan yang menutup lapangan usaha baik dikarenakan menurunnya minat pembeli, pembatasan pendistribusian barang, dan prosedur larangan dari pemerintah lainnya. Dari hal tersebut banyak masyarakat yang kehilangan lapangan pekerjaan bahkan di PHK (Putusan Hubungan Kerja) sehingga dampak lanjutan dari pandemik COVID-19 banyak masyarakat yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari; *kedua* dalam keberlangsungan aktivitas pembelajaran selama pandemic COVID-19 sesuai keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Direktorat Pendidikan Tinggi No.1 Tahun 2020 Tentang pencegahan COVID-19 yang berisi intruksi pembelajaran jarak jauh (*daring*). Pelaksanaan pembelajaran daring ini juga terdapat kendala mendasar dimana banyak murid/mahasiswa yang terbengkalai dalam pengaksesan internet, baik dari segi kualitas jaringan dan kendala biaya pembelian kuota. *Ketiga* dalam segi agama masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara betul bagaimana prosedur dan hukum pelaksanaan ibadah dirumah karena minimnya pengetahuan.

Data terkini terkait perkembangan kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia hingga tanggal 14 September 2020 tercatat ada 388.769 kasus COVID-19 dengan klasifikasi 221.523 orang yang dinyatakan positif COVID-19, 8.841 orang meninggal dunia, 158.405 orang sembuh, data ini merupakan data yang terkonfirmasi oleh pemerintah yang tersebar di 34 Provinsi dan 481 Kabupaten/Kota. Adapun laporan data perkembangannya adalah sebagai berikut:

Tabel I. 1 Laporan media harian COVID-19 di Indonesia per-15 Desember 2020

LAPORAN MEDIA HARIAN COVID19 TANGGAL 15 DESEMBER 2020 PUKUL 12.00 WIB

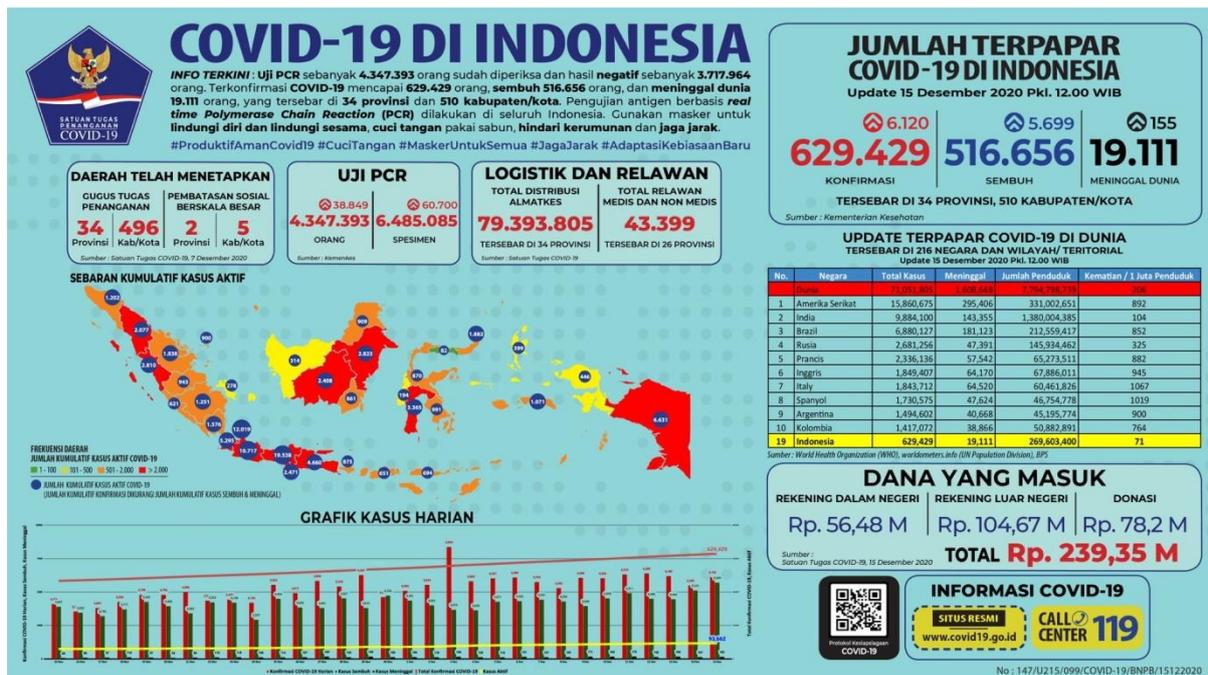
data dapat berubah sesuai hasil verifikasi

NO	PROVINSI	JUMLAH KASUS TANGGAL 15 DESEMBER 2020			JUMLAH KASUS SEMBUH			JUMLAH KASUS MENINGGAL		
		S/D 14 DESEMBER 2020	15 DESEMBER 2020	KASUS KUMULATIF	S/D 14 DESEMBER 2020	15 DESEMBER 2020	KUM	S/D 14 DESEMBER 2020	15 DESEMBER 2020	KUM
1	ACEH	8526	12	8538	6896	86	6982	352	2	354
2	SUMATERA UTARA	16769	74	16843	14046	75	14121	644	1	645
3	SUMATERA BARAT	21758	39	21797	18383	151	18534	449	4	453
4	RIAU	22433	176	22609	20131	124	20255	513	3	516
5	JAMBI	2702	50	2752	1687	75	1762	47	0	47
6	SUMATERA SELATAN	10335	73	10408	8534	59	8593	561	3	564
7	BENGKULU	2463	80	2543	1792	30	1822	100	0	100
8	LAMPUNG	4776	73	4849	2896	156	3052	217	4	221
9	BANGKA BELITUNG	1447	39	1486	1134	53	1187	20	1	21
10	KEPULAUAN RIAU	6313	20	6333	5270	6	5276	157	0	157
11	DKI JAKARTA	154005	1117	155122	138994	1137	140131	2950	22	2972
12	JAWA BARAT	66810	1256	68066	55129	1140	56269	1072	8	1080
13	JAWA TENGAH	67496	764	68260	45171	877	46048	2651	23	2674
14	DI YOGYAKARTA	8258	160	8418	5668	107	5775	169	3	172
15	JAWA TIMUR	70634	735	71369	60980	760	61740	4920	49	4969
16	BANTEN	15110	166	15276	9577	23	9600	378	3	381
17	BAU	15510	73	15583	14168	72	14240	463	5	468
18	NUSA TENGGARA BARAT	5063	34	5097	4171	19	4190	255	1	256
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1547	12	1559	830	1	831	34	0	34
20	KALIMANTAN BARAT	2776	13	2789	2424	26	2450	24	1	25
21	KALIMANTAN TENGAH	8019	106	8125	5309	164	5473	234	4	238
22	KALIMANTAN SELATAN	14123	48	14171	12683	70	12753	555	2	557
23	KALIMANTAN TIMUR	22469	393	22862	19224	130	19354	642	3	645
24	KALIMANTAN UTARA	2294	74	2368	1376	50	1426	31	2	33
25	SULAWESI UTARA	8058	58	8116	5936	27	5963	270	1	271
26	SULAWESI TENGAH	2474	39	2513	1531	24	1555	86	2	88
27	SULAWESI SELATAN	23494	78	23572	19564	108	19672	534	1	535
28	SULAWESI TENGGARA	7185	57	7242	6077	54	6131	117	3	120
29	GORONTALO	3321	1	3322	3145	0	3145	95	0	95
30	SULAWESI BARAT	1586	21	1607	1381	6	1387	26	0	26
31	MALUKU	4912	137	5049	3881	27	3908	69	1	70
32	MALUKU UTARA	2530	21	2551	2063	5	2068	84	0	84
33	PAPUA	12503	110	12613	5833	7	5840	142	0	142
34	PAPUA BARAT	5616	11	5627	5073	10	5083	95	3	98
	Dalam Proses Verifikasi di Lapangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>623309</b>	<b>6120</b>	<b>629429</b>	<b>510957</b>	<b>5699</b>	<b>516656</b>	<b>18956</b>	<b>155</b>	<b>19111</b>

Sumber Data : Kementerian Kesehatan RI

Sumber: [https://twitter.com/BNPB\\_Indonesia/status/1338771402166476800/photo/4](https://twitter.com/BNPB_Indonesia/status/1338771402166476800/photo/4)  
diakses pada 15/12/20 22:20 WIB

Gambar I. 1 Grafik kasus harian COVID-19 di Indonesia & update terparap kasus COVID-19 di Dunia per-15 Desember 2020



Sumber: [https://twitter.com/BNPB\\_Indonesia/status/1338771402166476800/photo/2](https://twitter.com/BNPB_Indonesia/status/1338771402166476800/photo/2)

diakses pada 15/12/20 22:20 WIB

Dari perkembangan data tersebut hingga 15 Desember 2020 menunjukkan jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia tercatat 629.429 orang terkonfirmasi dengan klasifikasi 516.656 orang sembuh dan 19.111 orang meninggal dunia. Negara Indonesia menduduki peringkat ke 19 terkait paparan kasus COVID-19 di dunia dari 216 negara lainnya. Beberapa upaya pemerintah untuk menekan penyebaran paparan COVID-19 di Indonesia yaitu dengan melakukan pengujian antigen berbasis *real time Polymerase Chain Reaction* (Uji PCR) yang dilakukan di seluruh Indonesia dengan pengambilan *sample* sebanyak 4.347.393 orang dan 3.717.964 orang dinyatakan negatif. Kemudian dengan menetapkan gugus tugas penanganan di 34 Provinsi, 496 Kabupaten/Kota, serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 2 Provinsi dengan 5 Kabupaten/Kota. Menurut data grafik kasus COVID-19 harian di Indonesia mulai dari tanggal 15 November 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 ditunjukkan bahwasannya grafik kasus COVID-19 di Indonesia masih *fluktuatif* dan cenderung mengalami kenaikan disetiap harinya, padahal kebijakan-kebijakan pemerintah melalui berbagai lapisan elemennya telah diluncurkan dengan mengupayakan berbagai macam cara untuk menekan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Oleh maka dari itu untuk menangani kasus pandemi ini tidak dapat serta merta hanya pemerintah saja yang berperan aktif dalam meminimalisir potensi penyebaran COVID-19 di Indonesia ini, akan tetapi perlunya kerjasama antara pihak pemerintah dengan berbagai kalangan masyarakat, baik dari masyarakat biasa ataupun *civil society* (LSM, Ormas, Organisasi Sosial, Organisasi Profesi, Organisasi Keagamaan, Serikat Buruh, dan lain-lain) untuk saling bersinergi memerangi COVID-19 di Indonesia. Dengan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait salah satu *civil society organization* berbasis agama yaitu Muhammadiyah sebagai salah satu *civil society* yang berperan aktif dalam penanganan COVID-19 di Indonesia dengan melalui kontribusinya di berbagai aspek kehidupan dan tanggapannya terhadap kebijakan pemerintah.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana kontribusi Muhammadiyah sebagai CSO dalam dalam penanganan wabah COVID-19 di Indonesia?

### **I.3 Tujuan**

Untuk mengetahui kontribusi Muhammadiyah sebagai CSO dalam penanganan wabah COVID-19 di Indonesia.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaplikasian teori *civil society* dalam upaya penanganan COVID-19 di Indonesia. Teori ini diperinci kedalam kategori *Islamic Civil Society Organization* yaitu Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam di Indonesia yang turut berkontribusi dalam upaya penanganan COVID-19 yang sedang menjadi polemik di berbagai penjuru negara, khususnya Indonesia. Dalam hal ini Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia berupaya melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19 dengan melihat keterbatasan-keterbatasan langkah gerak pemerintah di beberapa hal, jadi dalam penelitian ini berusaha untuk menambah kajian mengenai kontribusi *Islamic Civil Society Organization* di Indonesia (Muhammadiyah) dalam upaya penanganan COVID-19. Adapun hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu jawaban atas permasalahan tersebut. Disamping itu, penelitian ini diharapkan mampu menambah literature studi tentang peranan *Civil Society* khususnya *Islamic Civil Society Organization* dalam menghadapi wabah global.

#### **2. Manfaat Praktis**

Di sisi lain, penelitian ini juga memberikan manfaat praktis untuk *civil society*, ormas, LSM dan pemerintah yang berkaitan, dengan harapan dapat mempelajari hasil penelitian ini untuk kemudian dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan evaluasi sehingga menghasilkan strategi, inovasi, dan motivasi untuk turut serta berkontribusi dalam penanganan COVID-19. Dengan kemudahan akses internet hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai jalur pintas studi banding dan meperkecil anggaran finansial, waktu, dan tempat untuk melakukan transfer ilmu bagi *civil society*, ormas, LSM dan pemerintah yang

berkaitan. Sedangkan bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat memperkaya informasi dan solusi atas suatu permasalahan sosial.

## I.5 Literature Riview

Tabel I. 2 Literature Riview

No	Judul (Penulis Tahun)	Metode Penelitian	Teori	Temuan
1.	Analisis pengukuran tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah: Kekuatan bagi penanganan Covid-19 berbasis masyarakat (Mufti et al., 2020)	analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi masyarakat Jawa Barat. Sampel tersebut dibagi pada 5 kluster masyarakat, yakni civil society, partai politik, pengusaha, Aparatur Sipil Negera (ASN), dan masyarakat umum.	keterlibatan masyarakat dalam penanganan Covid-19 & hubungan kepercayaan dan kebijakan publik pada masa Covid19	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah rata-rata 3,27% atau ekuivalen cukup rendah. Namun demikian, pada kluster partai politik, ASN dan masyarakat umum menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi atau percaya. Ini menjadi modal penting, baik sebagai peluang maupun tantangan, bagi kebijakan percepatan penanganan Covid-19
2.	<b>Penanganan Limbah Infeksius Rumah Tangga Pada Masa Wabah COVID-19</b> (Amalia et al., 2020).	Menggunakan pendekatan kualitatif f, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari	Peraturan Perundangan, Jurnal, Buku, dan Protokol dari NGO	Data yang diperoleh didiskusikan bersama tim peneliti untuk kemudian dihasilkan suatu protokol

		berbagai sumber, yaitu: Peraturan Perundangan, Jurnal, Buku, dan Protokol dari NGO.		penanganan limbah domestik pada masa pandemik COVID-19.
3.	<b>Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19 (Yunus &amp; Rezki, 2020)</b>	Kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Studi hukum ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan kasus.	Peneitian ini menggunakan teori kebijakan pemerintah terkait lockdown dan analisis undang-undang guna antisipasi penyebaran COVID-19	Hasil penelitian menyatakan bahwa Indonesia sudah mengalami kondisi dimana kekhawatiran masyarakat terhadap COVID-19 cukup besar, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk melakukan Lockdown, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona.
4.	<b>Inovasi Kebijakan Publik Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Di Jawa Barat (Anggara et al., 2020)</b>	Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis studi literature berbagai kebijakan publik untuk mengembangkan konsep-konsep yang sesuai dengan kajian inovasi kebijakan public.	Analisis berdasarkan teori dan konsep inovasi kebijakan publik yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk studi policy research dengan proses interpretasi	Hasil penelitian ini untuk melihat sejauhmana kebijakan pemerintah terkait dengan adanya wabah Covid-19 di Jawa Barat. Dengan adanya konsep inovasi kebijakan publik yang implementatif harapannya dapat memberikan hasil yang lebih kongkrit

			data (Anggara, 2015)	dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan dapat diterapkan pada tahap awal formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan public.
5.	<b>Analisa Pengelolaan Kampanye Public Relations tentang Pencegahan Covid-19 di Indonesia</b> (Astuti et al., 2020)	Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivistik dengan pendekatan interpretif dan metode analisis deksriptif, dimana peneliti menganalisa fenomena social yang dikonstruksikan oleh masyarakat berdasarkan realitas yang ada.	Peranan Humas pemerintah Indonesia dalam menghadapi kasus Covid-19	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pemerintah Indonesia mengelola kampanye <i>public relations</i> tentang pencegahan Covid-19. Dengan menggambarkan pengelolaan kampanye <i>public relations</i> tentang pencegahan covid-19 melalui tiga tahapan yaitu <i>fact finding, planning &amp; programming, taking action &amp; communicating</i> yang dilakukan secara efektif.
6.	<b>Model Pemberdayaan Jamaah Masjid Menghadapi Dampak Coronavirus Disease</b>	Metode riset aksi yang memadukan antara pengumpulan dan pengolahan data	Pengembangan Masyarakat Islam dengan <i>Core</i>	Hasil penelitian ini berupa kerjasama dan kesepakatan pemberdayaan jamaah

	2019 (Covid 19) (Shodiqin et al., 2020)	dengan proses pemberdayaan secara paralel	<i>Competency</i> pemberdayaan SDM bidang keagamaan.	masjid Al-Mu'minuun dalam menghadapi dampak Covid 19 yang disesuaikan dengan tahapan siklus riset melalui beberapa program pemberdayaan di bidang kesehatan, ekonomi dan keagamaan.
7.	<b>Model Pengembangan Aplikasi Mobile E-Dakwah Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Metode Prototyping</b> (Putra et al., 2020)	Metode pengembangan aplikasi ini menggunakan metode Prototyping.	Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan dakwah. Konsep e-dakwah dalam kegiatan keagamaan sebagai adaptasi kebiasaan baru yang dimulai oleh masjid.	Hasil penelitian ini berupa aplikasi mobile e-dakwah untuk kegiatan dakwah yang berisi fitur-fitur seperti jadwal kajian serta materi, info kegiatan, doa-doa, hadits, video, kisah nabi, cerita inspirasi dan quote melalui perangkat mobile android.
8.	<b>Pesan Dakwah Ormas Islam Indonesia dalam Menghadapi Krisis Keagamaan Masa Pandemi Covid-19</b> (Suherdiana et al., 2020)	Metode kualitatif, analisis isi, teknik dalam menganalisis dan mengolah isi pesan atau informasi baik dalam media cetak maupun elektronik yang	Pesan dakwah berkaitan tentang pandemi Corona dari 5 website ormas Islam yang diambil dalam	Hasil penelitian ini merupakan tentang bagaimana ormas Islam menyampaikan pesan dakwah pada masa darurat pandemi Covid-19, baik dari segi konten

		berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi	kurun waktu 29 Februari 2020 – 30 April 2020 sebanyak 418 pesan	pesan dakwah yang disampaikan, jenis pesan dakwah yang disampaikan, hingga tokoh/da'i dalam pesan dakwah yang disampaikan Ormas Islam Indonesia di masa pandemi Covid-19.
9.	<b>Qadariyah, Jabariyah Dan Ahlussunnah (Studi Komparatif Merespon Kebijakan Pemerintah Dan Fatwa Mui Dalam Mencegah Penularan Covid-19)</b> (Mahmuddin & Syandri, 2020)	Metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data berhubungan dengan tiga aliran teologi yang berkembang di Agama Islam.	Aliran teologi yang berkembang dalam Islam yaitu Qadariyah, Jabariyah dan Ahlussunnah dalam merespon edaran pemerintah dan MUI	Hasil penelitian ini menunjukkan ada tiga kelompok dalam menyikapi persoalan takdir. Pertama, Jabariyah yaitu kelompok yang hanya bertawakkal kepada Allah, namun menafikan ikhtiar. Kedua, Qadariyyah merupakan kelompok yang menafikan takdir, hanya melakukan ikhtiar namun melupakan tawakkal kepada Allah. Ketiga adalah kelompok pertengahan yaitu Ahlussunnah yang mampu menggabungkan antara tawakkal

				dengan ikhtiar dalam permasalahan takdir
10.	<b>Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi COVID-19</b> (Sampurno et al., 2020)	Metode kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan virtual etnografi yang mengacu pada pengaturan online tentang internet dan media social.	Budaya Media Sosial dalam mengedukasi masyarakat untuk menghadapi pandemi Covid-19	Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya media sosial mampu mengedukasi dan menstimulasi masyarakat terkait COVID-19 dengan mengarahkan masyarakat ke situs web dan halaman terkait informasi COVID-19 terbaru dan terpercaya.

Telah banyak penelitian tentang percepatan penanganan dan pencegahan COVID-19 di Indonesia, di antaranya penelitian Mufti, Muslim et al. (2020) tentang upaya pemerintah untuk menangani COVID-19, seperti pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, sejauh ini belum menunjukkan efektivitas sebagaimana mestinya (republika.co.id, 28/4/2020). Sehingga sangat berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap pemerintah dan keberlangsungan serta keberhasilan kebijakan yang ditetapkannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai kekuatan politik yang memiliki betugas meramu berbagai unsur dalam masyarakat dan ragam kepentingan agar percepatan penanganan COVID-19 tercapai.

Selanjutnya penelitian oleh Amalia et al. (2020) tentang limbah infeksius yang dihasilkan rumah tangga pada masa pandemi COVID-19 berpotensi mengalami peningkatan. Penanganan limbah infeksius rumah tangga penting diketahui dan dilakukan masyarakat untuk menekan laju penyebaran virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Penanganan limbah infeksius pada rumah tangga dapat dilakukan dengan beberapa langkah efektif. Harapannya penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi dan media sosialisasi penanganan limbah infeksius skala rumah tangga bagi masyarakat luas.

Selanjutnya penelitian Yunus & Rezki (2020) yang meneliti tentang kebijakan pemerintah terkait lockdown dan analisis undang-undang guna antisipasi penyebaran COVID-19. Indonesia sudah mengalami kondisi dimana kekhawatiran masyarakat terhadap COVID-19 cukup besar, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk melakukan *Lockdown*, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Walau pun tentunya menimbulkan dampak negatif yang beresiko pada tatanan perekonomian negara. Dalam pelaksanaan lockdown perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat tanpa membatasi agama, kalangan, dan profesi. Selain itu pentingnganya peran media massa dalam memberikan informasi yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kericuhan akibat isu-isu yang belum jelas kebenarannya.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Anggara et al. (2020) tentang konsep baru/inovasi kebijakan publik yang dilakukan pemerintah Jawa Barat. Penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan partipasi masyarakat dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dan inovasi kebijakan tersebut harapannya dapat diterapkan pada tahap awal formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Akantetapi kebijakan ini belum bisa berjalan dilapangan dan produk kebijakan penanganan wabah belum memberikan kebermanfaatn yang cukup berarti bagi masyarakat secara sustainable serta tidak memberikan ketersinambungan secara sistem sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak.

Selanjutnya penelitian oleh Astuti, Ma'arif & Fuad (2020) tentang cara pemerintah Indonesia mengelola kampanye *public relations* tentang pencegahan COVID-19 yang menggambarkan bahwa dalam mengelola kampanye *public relations* dalam pencegahan COVID-19 dilakukan melalui 3 tahap: 1) *fact finding* dengan mengumpulkan data dan fakta melalui opini, sikap, perilaku masyarakat berdasarkan metode *media content analysis* dan *field report*. 2) *Planning & programming* dengan menentukan tujuan, sasaran, komunikator, isi pesan dan media yang digunakan, program ini disebut sebagai program darurat. 3) *Taking action & communicating* dengan melaksanakan kampanye tentang pencegahan COVID-19 melalui pesan yang disampaikan oleh juru bicara Gugus Tugas COVID-19.

Selanjutnya penelitian oleh Shodiqin et al. (2020) tentang kerjasama dan kesepakatan pemberdayaan jamaah masjid Al-Mu'minuun dalam menghadapi dampak COVID-19. dalam penelitian ini terdapat proses penyelesaian pro kontra antara jamaah masjid Al-Mu'minuun

terhadap fatwa MUI yang dikeluarkan pada masa PSBB ini adalah dengan cara membangun sinergitas yang baik antara DKM, HIRA dan para Tokoh Agama melalui pendekatan persuasif yang terindikasi dengan semangat kerjasama antara semua pihak sehingga dikeluarkannya SOP beribadah yang tentunya sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan oleh Pemerintah setempat serta dilakukannya sosialisasi dengan gencar terkait bahaya COVID-19 dan memutus mata rantai penyebaran Covid 19 baik melalui acara keagamaan, maupun melalui media sosial. Adapun model pemberdayaan yang disesuaikan dengan tahapan siklus riset melalui beberapa program pemberdayaan yang terbagi menjadi tiga bidang yakni, pemberdayaan bidang kesehatan, Ekonomi dan Keagamaan. Dengan adanya program pemberdayaan oleh DKM Al-Mu'minuun dalam rangka menghadapi dampak COVID-19 memberikan rasa nyaman dan aman dalam menghadapi dampak COVID-19.

Selanjutnya penelitian oleh Putra, Eldiana & Aryani (2020) tentang model pengembangan aplikasi mobile e-dakwah di masa pandemi dengan metode *prototyping* dimana pandemi COVID-19 mengubah berbagai aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan dakwah. Dengan memanfaatkan perkembangan dan keberadaan internet dan media sosial mengingat adanya pembatasan berbagai kegiatan keagamaan di masa pandemi COVID-19 menjadi tantangan dan peluang dalam kegiatan dakwah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan dakwah memunculkan konsep e-dakwah. Model pengembangan aplikasi e-dakwah memberikan solusi bagi masjid agar dapat tetap menjalankan aktifitasnya melalui daring. E-dakwah berisikan fitur-fitur seperti jadwal kajian serta materi, info kegiatan, doa-doa, hadits, video, kisah nabi, cerita inspirasi dan quote yang dapat diakses dimanapun dengan bantuan internet dan perangkat mobile android.

Selanjutnya penelitian oleh Suherdiana et al. (2020) tentang bagaimana ormas Islam menyampaikan pesan dakwah pada masa darurat pandemi Covid-19 dalam menghadapi krisis keagamaan. Dalam penelitian menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang bentuk pesan dakwah, isi pesan dakwah, jenis pesan dakwah dan pembuat pesan dakwah di masa pandemi COVID-19 dari empat Ormas Islam Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia, Nahdhatul Ulama, Persatuan Islam, Al-Washliyah. Hasil penelitian menemukan bahwa bentuk pesan dakwah yang disampaikan ormas Islam lebih banyak berkaitan tentang berita kegiatan menghadapi masa pandemi, berita opini, opini dan panduan organisasi menghadapi wabah seperti fatwa, himbauan, dan surat edaran,. Sedangkan Isi pesan dakwah banyak berkaitan dengan kegiatan muamalah, juga ibadah dan aqidah. Adapun pembuat pesan dakwah

dilakukan oleh pengurus pusat dan gugus tugas khusus penanganan COVID-19, lembaga, organ otonom, perguruan tinggi, rumah sakit dan pengurus Ormas di berbagai daerah.

Selanjutnya penelitian oleh Mahmuddin & Syandri (2020) tentang cara seseorang menyikapi persoalan takdir dalam merespon kebijakan pemerintah dan fatwa MUI dalam mencegah penularan COVID-19. 1) Jabariyah yaitu kelompok yang hanya bertawakkal kepada Allah, namun menafikan ikhtiar. 2) Qadariyyah merupakan kelompok yang menafikan takdir, hanya melakukan ikhtiar namun melupakan tawakkal kepada Allah. 3) kelompok pertengahan yaitu Ahlussunnah yang mampu menggabungkan antara tawakkal dengan ikhtiar dalam permasalahan takdir.

Selanjutnya penelitian oleh Sampurno, Kusumandyoko & Islam (2020) tentang budaya media sosial yang mampu mengedukasi dan menstimulasi masyarakat terkait COVID-19 yang menunjukkan bahwasannya budaya media sosial mampu mengedukasi dan menstimulasi masyarakat. Adapun upaya tersebut menunjukkan budaya media sosial di Indonesia dapat bertindak sebagai guru yang mampu mengedukasi masyarakat dan menstimulasi dalam penelitian terbaru terkait COVID-19; sebagai pendidikan layanan kesehatan masyarakat; mengarahkan masyarakat ke situs web dan halaman arahan mereka untuk informasi terkait COVID-19 terbaru dan terpercaya; memasarkan layanan inovatif seperti layanan dana sosial perawatan kesehatan; posting terkait informasi kasus, foto, dan hasil (dengan izin) yang berkaitan dengan COVID-19 untuk mengedukasi masyarakat; berbagi ulasan dan testimoni pasien yang sembuh sebagai motivasi dan upaya awal pencegahan; dan memberikan dukungan antar warga negara Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Hasil dari beberapa penelitian sebelumnya diketahui bahwa strategi percepatan penanganan dan pencegahan COVID-19 di Indonesia mayoritas hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja. Adapun beberapa kontribusi yang telah dilakukan oleh beberapa instansi ataupun *civil society* umumnya hanya bersifat teoritis dan himbauan semata, belum mencakup mengenai kontribusi ataupun aksi nyata. Dari beberapa literature diatas, penulis menemukan gap dalam studi tentang penanganan COVID-19. Gap tersebut adalah tidak ditemukannya studi yang membahas tentang bagaimana ormas islam Muhammadiyah selaku *Civil Society Organization* (CSO) berperan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia.

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, dimana dalam penelitian ini menfokuskan tentang bagaimana peran CSO khususnya Muhammadiyah

berkontribusi dalam percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Dalam aksinya ini Muhammadiyah membentuk TIM khusus yang bernama Muhammadiyah COVID-19 *Command Center* (MCCC) untuk konsentrasi dalam menangani persebaran COVID-19 di penjuru Indonesia yang dibantu dengan ortom-ortom Muhammadiyah, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang berkaitan dan mitra lainnya.

## I.6 Kerangka Teori

### 1. Civil Society Organization (CSO)

#### 1) Civil Society

Menurut perkembangan sosial *civil society* berawal hadir dari tradisi pemikiran Barat. Dalam bahasa Indonesia *civil society* bermakna masyarakat sipil yang tidak memiliki keterkaitan dengan sistem pemerintahan militer. Dalam teori ini, sebenarnya *civil society* merupakan lawan dari konsep *state society* (masyarakat negara) atau *political society* (masyarakat politik), teori pemikiran seperti ini pertamakali lahir di Eropa sebagai pusat sejarah sistem pemerintahan yang mencakup produk sosial budaya dan politik di barat (Effendy, 2020, hlm. 23).

Istilah *civil society* pertama kali diperkenalkan oleh Ferguson, pemikir Skotlandia, yang semenjak itu menjadi perbincangan dalam diskursus politik saat masyarakat mengalami perubahan sosial untuk mencari rumusan masyarakat yang ideal, mempunyai pola hubungan seimbang dengan negara (Yusron, 2009, p. 16).

Sementara menurut Antonio Gramsci (1891-1937) pada abad ke 20, *civil society* dapat diibaratkan sebagai wadah dari berbagai ideologi yang menggunakan hegemoni mereka sendiri untuk mencapai konsensus. Dalam hal ini *civil society* dipandang sebagai entitas penyeimbang kekuatan Negara, yang mana *civil society* ditempatkan beriringan dengan negara sehingga membentuk sebuah keteraturan dalam pola bermasyarakat (*regulated society*) (Faulks, 2014, hlm. 49).

Civil society pada dasarnya mencakup seperangkat organisasi dan lembaga, namun tidak terbatas pada hal tersebut. Civil society dapat dimaknai sebagai “ruang” hubungan sosial yang memediasi antara individu dengan negara (Gready & Robins, 2017).

Eisenstadt mengemukakan empat syarat *Civil Society*, yaitu: *satu*, otonomi; *kedua*, akses masyarakat terhadap lembaga negara; *ketiga*, arena publik yang bersifat

otonom, dan; *keempat*, arena publik tersebut terbuka bagi semua lapisan masyarakat (Gaffar, 1999, hlm. 180).

## 2) *Civil Society Organization (CSO)*

*Civil society* menurut pandangan Cohen dan Arato (1992) *civil society* merupakan sebuah bentuk interaksi sosial yang di dalamnya meliputi berbagai kelompok sosial baik dari golongan kekerabatan, organisasi, gerakan kemasyarakatan, dan berbagai wadah komunikasi publik lainnya yang terbentuk dari berbagai bentuk pengaturan dan mobilisasi oleh diri sendiri secara independen baik dalam suatu bentuk kelembagaan ataupun kegiatan (Cohen & Arato, 1992).

Afan Gaffar, sebagaimana mengutip pendapat Michael Walker (1995), yang memaknai *civil society* sebagai suatu *space* (ruang) atau penghubung yang terletak antara negara dan masyarakat. Dalam hal ini *civil society berperan sebagai* asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun dalam sebuah jaringan yang berdasarkan ikatan keluarga, keyakinan, kepentingan, dan ideologi. Asosiasi tersebut dapat berupa berbagai macam bentuk, seperti ikatan pengajian, persekutuan gereja, koperasi, kalangan bisnis, rukun tetangga dan rukun warga, ikatan profesi, dan lain sebagainya. Hubungan asosiasi ini terbangun atas dasar toleransi dan tumbuhnya rasa untuk saling menghormati antara satu sama lainnya (Gaffar, 2004, hlm. 179–180).

Di Indonesia konsep *civil society* dipahami dengan perspektif yang berbeda-beda. Dalam konsep dasar terdapat tiga perspektif yang dibawakan oleh Hegelian, Gramscian dan Tocquevillian. Menurut pandangan Hegelian *civil society* menekankan pentingnya kelas menengah dan pemberdayaan di sektor ekonomi. Sedangkan Gramscian melihat *civil society* dengan menekankan tentang peran penting masyarakat sipil untuk menghadapi hegemoni negara dan yang terakhir Tocquevillian dalam memandang *civil society* dengan menekankan pentingnya penguatan organisasi independen dan penerapan budaya sivik untuk membangun jiwa demokrasi (Yusron, 2009, p. 18).

Definisi seperti demikian seringkali dikaitkan dengan fungsi dan eksistensi dari non-governmental organization (NGO), namun lebih daripada itu, *civil society* dapat tercipta dengan berbagai macam bentuk. *Civil society* merupakan struktur yang sama

sekali tidak homogen, mencakup berbagai kelompok, organisasi, non-governmental organization, serta gerakan sosial yang mencerminkan perbedaan, dan dalam banyak kasus, jika mengacu kepada pandangan Gramsci, memiliki kepentingan yang bertolak belakang dengan kepentingan negara (Wise, 2018).

Menurut Chazan, 2003 dalam (Efendi, 2017) organisasi masyarakat sipil disebut juga NGO, atau Civil Society Organization (CSO) didefinisikan sebagai kelompok-kelompok asosiasi yang berfungsi mengerem kekuasaan negara, menjadi perantara aspirasi masyarakat kepada negara, dan merupakan kelembagaan sosial yang saling berinteraksi internal dan eksternal yang dapat menjadi pendukung dan penghambat kerja-kerja negara.

### 3) *Islamic Civil Society Organization (ICSO)*

Konsep *Civil society* merupakan konsep yang menarik untuk dibahas dari beberapa sudut pandang kehidupan, baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan agama. Konsep ini banyak ditawarkan oleh para tokoh sebagai pondasi teoritis dalam upaya pencapaian pola tatanan masyarakat adil dan sejahtera. Dalam setiap perkembangannya konsep ini memiliki pergeseran makna, oleh maka dari itu guna mempersempit lingkup makna *civil society* di sini didefinisikan dalam lingkup kehidupan sosial yang terorganisasi dengan memiliki ciri-ciri kesukarelaan, keswadayaan, keswasembadaan dan kemandirian dalam perspektif Islam yang disebut juga dengan istilah *Islamic Civil Society Organization (ICSO)*.

Meskipun teori ini bermula dari Barat, akan tetapi memiliki makna tersendiri bagi umat Muslim. Islam sebagai agama universal dan dianut oleh sepertiga penduduk dunia menjadi salah satu agama yang dianggap paling berpeluang dalam menanggapi hal ini. Hal ini disebabkan sebagai agama yang bersifat menyeluruh dan melingkupi semua aspek kehidupan, Islam dianggap memiliki kesamaan konsep dengan *civil society*. Akan tetapi, anggapan kesamaan konsep ini tidak serta merta diterima oleh semua kalangan umat muslim.

Umat muslim yang memiliki pandangan fundamental menganggap bahwa ajaran yang terkandung dalam agama Islam yang terdapat di Al-Qur'an dan Hadist bersifat mutlak dan telah mencakup aspek-aspek yang kompleks dan menyeluruh untuk

mengajarkan semua aspek kehidupan, sehingga menilai tidak memerlukan konsep lain seperti *civil society*. Disisi lain *civil society* merupakan konsep lahiran dari Barat yang notabene masyarakatnya bukan beragama Islam. Maka sebab dari itu beberapa muslim fundamental menganggap *civil society* tidak perlu dan tidak sesuai dengan konsep Islam (Kamil, 2013, hlm. 128).

Perbedaan pendapat dikemukakan oleh Gellner, dimana dalam pandangannya posisi agama tidak mengalami perubahan yang signifikan seperti yang terjadi Barat (dominasi gereja yang menyebabkan reformasi agama). Dalam teorinya dibuktikan bahwasannya Islam menjadi semakin kuat dengan konsep yang telah ditempuh, salah satunya dengan pengaplikasian konsep *civil society*. Islam memiliki kekuatan yang sangat berpengaruh dengan latar belakang masyarakat Islam hadir dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat kalangan bawah, menengah, hingga elit-elit penting dalam tatanan struktural negara, sehingga hal ini mendukung pembentukan *Islamic Civil Society Organization (ICSO)* didalam agama Islam. Selain itu nilai-nilai Barat seperti modernisasi atau *westernisasi* tidak mampu mengubah pola pikir umat muslim dalam mengaplikasikan ajaran-ajaran agama Islam. Hal-hal seperti ini menjadi sorotan yang menarik, dimana kekuatan internal masyarakat Islam mampu menunjukkan eksistensi wajah Islam yang dapat mengikuti perkembangan menjadi masyarakat modern tanpa harus menjadi Barat (Culla, 1999, hlm. 21).

Adapun seiring perkembangannya hadir makna lain dari *civil society* yang berarti masyarakat madani, yaitu masyarakat kota dan masyarakat beradab. Kata madani diambil dari kata *madinah* sebagai kota di timur tengah yang sejahtera pada zaman Rasulullah. Dalam teori ini konsep *civil society* berarti kehidupan sosial yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh manusia dengan mengedepankan nilai-nilai demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga dapat membentuk suatu jaringan yang produktif didalam ikatan sosial dan solidaritas kemanusiaan guna terciptanya kebaikan bersama dan dinilai cocok untuk diterapkan di Indonesia. *Civil society* yang disebut masyarakat madani sebagaimana dimaknai oleh para pelopornya memiliki tiga ciri utama, yaitu: *pertama*, terdapat kemandirian yang relative tinggi dari individu dan kelompok dalam tatanan kehidupan masyarakat masyarakat terutama ketika berhadapan dengan Negara; *kedua*, terdapat ruang publik bebas (*public sphere*) sebagai upaya keterlibatan politik secara aktif warga negara yang berkaitan dengan

kepentingan public; *ketiga*, terdapat kemampuan untuk membatasi kuasa otoritas negara (Sufyanto, 2001, hlm. 113–115).

CSO diklasifikasikan dalam beberapa jenis berdasarkan tujuannya terdapat lima tipe utama CSO yang diantaranya *pertama* adalah keagamaan, walaupun disebut sebagai CSO keagamaan, mereka tidak mempromosikan agama dalam perencanaan program. Kegiatan primer yang dilakukan berkisar antara kesehatan, pendidikan, pendampingan kebutuhan dasar, dan kegiatan kedaruratan, *kedua* CSO berbasis masyarakat. Mereka berlandaskan solidaritas, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan komunitas *ketiga* adalah CSO filantropi. Organisasi tipe ini memberikan layanan berbasis kemanusiaan tanpa memandang agama *keempat* adalah CSO ahli. CSO ini bergerak di bidang baru yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya lingkungan dan keuangan. Mereka memiliki unit keahlian dan mempublikasikan beberapa laporan teknis, terakhir yang *kelima*, yaitu serikat pekerja berdasarkan kepentingan mereka (Augur, 2012). Adapun CSO berbasis agama (Islami Civil Society Organization) atau ICSO yang dikenal di Indonesia antara lain: ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang merupakan terbesar di Indonesia (Ganjar, 2016, p. 52).

#### 4) Peran CSO

David Lewis dan Nazneen Kanji mendefinisikan bahwa NGO (Non-Government Organization) sebagai solusi baru dalam pemecah permasalahan pemerintah, Non-Governmental Organization juga merupakan pelaku utama sektor ketiga dalam lanskap pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, lingkungan dan area lainnya dalam aksi publik dimana sebuah NGO dapat didefinisikan sebagai sebuah “*voluntary associations*” yang memiliki kepedulian untuk merubah sebuah lingkungan tertentu dalam konteks yang lebih baik (Lewis & Kanji, 2009). David Lewis dan Nazneen Kanji dalam bukunya yang berjudul “*Non-Governmental Organization and Development*” mengklasifikasikan peran NGO menjadi 3 hal yaitu *Service Delivery* atau *Implementer*, *Catalysis*, dan *Partnership*. Peran *Service Delivery* atau *Implementer* dilakukan oleh NGO melalui program-program yang dibentuk oleh NGO untuk menyediakan bantuan berupa pelayanan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan (seperti perawatan kesehatan, pinjaman maupun bantuan dalam bidang ekonomi lainnya, penyuluhan pertanian, nasihat hukum atau bantuan darurat). Pelayanan bisa dilakukan ataupun

diberikan secara langsung kepada masyarakat di mana ketika tidak ada layanan yang disediakan atau di mana layanan yang telah disediakan tidak memadai, banyak NGO yang berperan sebagai *Implementer* atau *Service Delivery* ini memilih untuk bekerja bersama dengan pemerintah untuk memperkuat penyediaan layanan secara keseluruhan. Peran *Catalyst* dapat diartikan sebagai kemampuan NGO untuk menginspirasi dan mengubah kerangka berpikir aktor lain. Dapat diartikan bahwa NGO menjadi agen yang mampu menimbulkan perubahan, baik melalui advokasi maupun inovasi untuk menemukan solusi baru mengenai suatu isu. Peran ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu advokasi, inovasi, serta melalui *watchdog*. Peran *Partnership* dilakukan NGO melalui kerjasama dengan aktor lain baik pemerintah, donatur ataupun sektor privat dimana kedua belah pihak berbagi keuntungan ataupun risiko dari kerjasama yang terjalin tersebut. Kerjasama yang terjalin antara NGO dengan pemerintah dapat membantu pemerintah untuk menangani suatu permasalahan tertentu dimana terkadang program ataupun kebijakan pemerintah tersebut tidak berjalan dengan baik. Bentuk *Partnership* juga dapat dilihat pada kerjasama antara NGO dengan aktor lain baik individu maupun NGO berupa pembentukan program *Capacity Building* untuk meningkatkan dan memperkuat kapabilitas NGO ataupun masyarakat yang menjadi sasarannya (Lewis & Kanji, 2009).

Muhammad AS Hikam memandang bahwa LSM atau *civil society* dapat memainkan peran yang sangat penting dalam proses memperkuat gerakan demokrasi melalui perannya dalam pemberdayaan (*empowerment*) *civil society*, hal ini dapat dilakukan melalui berbagai aktifitas pendampingan, pembelaan dan penyadaran (Hikam, 1999).

Salah satu bentuk formal dari *civil society* ialah *non-governmental organization* (NGO). Menurut Willis (2005) peran-peran yang dilakukan NGO khususnya dalam pembangunan di masyarakat golongan bawah berorientasi atau mengacu pada:

- a. Kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan
- b. Bantuan darurat
- c. Pengembangan pendidikan
- d. Partisipasi dan pemberdayaan

e. Swasembada

f. Advokasi

g. Jaringan (Willis, 2005).

Dalam melihat hubungan masyarakat dengan negara, *civil society* dianggap mempunyai tiga fungsi *pertama*, *civil society* mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan dengan memajukan kegiatan yang ditujukan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik, *kedua*, *civil society* melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau tidak dilakukan negara dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas, *ketiga*, *civil society* sebagai kekuatan tandingan negara (*counter balancing the state atau counter veilling forces*) (Hand Out O8, n.d.).

Dalam perspektif Hikam, *civil society* adalah sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain: Kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), dan keswadayaan (*self supporting*). Kemandirian tinggi berhadapan dengan Negara, dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Dalam perwujudannya, ia akan berbentuk asosiasi atau organisasi yang dibuat oleh masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban-paguyuban atau kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*) yang merupakan perwujudan dari kelembagaan *civil society* (AS.Hikam, 1996, pp. 212–213).

Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini guna memperjelas dan memudahkan arah topik penelitian ini, maka penelitian dibatasi pada indikator yang mengacu pada teori David Lewis dan Nazneen Kanji yang mengklasifikasikan peran NGO atau CSO menjadi 3 hal yaitu *Implementer*, *Catalysis*, dan *Partnership* dan teori Muhammad AS Hikam yang memandang LSM atau CSO dapat memainkan peran pemberdayaan (*empowerment*). Adapun teori-teori yang lain oleh Willis (2005) akan peran NGO yang mengacu pada: kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan, bantuan darurat, pengembangan pendidikan, partisipasi dan pemberdayaan, swasembada, advokasi, dan jaringan serta teori Hikam (1996) akan ciri CSO yang meliputi kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), dan keswadayaan (*self supporting*) yang akan menjadi variabel dari indikator-indikator *implementer, catalysis, partnership, dan empowerment*.

## I.7 Definisi Konseptual

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan memperjelas maksud penelitian ini, maka definisi konseptual dalam penelitian dibatasi pada:

### 1. CSO

*Civil Society Organization (CSO)* adalah bentuk interaksi sosial yang di dalamnya meliputi berbagai kelompok sosial/asosiasi masyarakat yang dapat menjadi perantara aspirasi masyarakat kepada negara.

### 2. ICSO

*Islamic Civil Society Organization (ICSO)* adalah organisasi *civil society* berbasis keagamaan Islam.

### 3. Kontribusi CSO dalam penanganan COVID-19

Adapun kontribusi/peran CSO dalam penanganan COVID-19 adalah bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh CSO berbasis keagamaan yang merujuk pada organisasi Muhammadiyah (melalui MCCC) dalam penanganan wabah COVID-19 di Indonesia.

## I.8 Definisi Operasional

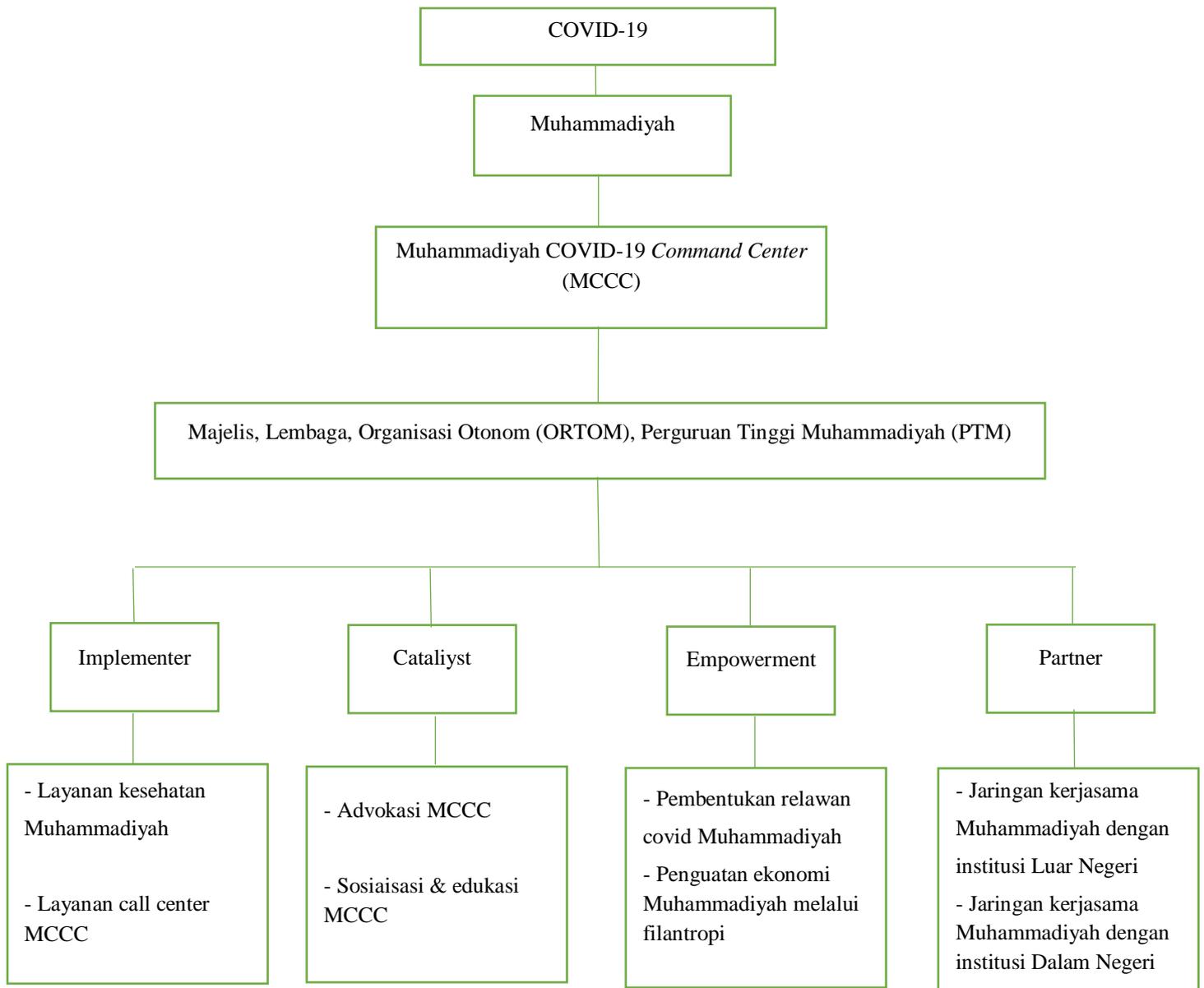
Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

### 1. Kontribusi CSO

Tabel I. 3 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Kontribusi	1) <i>Implementer</i> (pelaksana)	- layanan kesehatan Muhammadiyah - layanan call center MCCC
	2) <i>Catalyst</i> (katalisator)	- advokasi MCCC - sosialisasi & edukasi MCCC
	3) <i>Empowerment</i> (pemberdayaan)	- pembentukan relawan covid Muhammadiyah - penguatan ekonomi Muhammadiyah melalui filantropi
	4) <i>Partner</i> (mitra)	- jaringan kerjasama global Muhammadiyah - jaringan kerjasama nasional Muhammadiyah

## I.9 Kerangka Konsep



## I.10 Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data secara valid dengan maksud dan tujuan tertentu agar dapat ditemukan, dikembangkan, dan

dibuktikan, suatu penemuan tertentu guna dapat digunakan untuk memecahkan masalah tertentu (Sugiyono, 2017, p. 2). Metode penelitian juga dijelaskan sebagai anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian (Noor, 2011, p. 254). Jadi dapat disimpulkan dari kedua pendapat di atas bahwa metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk mendapatkan data dari suatu topik permasalahan untuk dijadikan bahan dasar teori berfikir dalam melaksanakan suatu penelitian.

Pengertian metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2017, pp. 8–9).

Jenis metode penelitian berdasarkan masalahnya terdiri dari beberapa jenis, salah satunya terdapat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat populasi daerah tertentu (Suryana, 2010, p. 18).

Sesuai dengan judul dalam penelitian “Kontribusi Muhammadiyah Dalam Penanganan COVID-19 di Indonesia” maka dari itu penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Alasan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena pada penelitian ini dalam memperoleh data difokuskan melalui pengamatan fenomena objek penelitian dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena objek penelitian tersebut. Adapun data yang diperoleh bersifat kompleks yang terlepas dari data-data numeric, sehingga pada penelitian kualitatif ini reliabilitas dan validitas tidak dapat diketahui melalui standar pengukuran. Selain itu peneliti dalam proses pengumpulan data berdasarkan pada pandangan dari sumber data secara murni, baik data-data yang berupa tulisan, pernyataan dan dokumen yang berupa data deskriptif, dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Penelitian kualitatif tersebut disajikan secara deskriptif, yang merupakan sebuah metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan

peristiwa-peristiwa secara sistematis, terperinci dan akurat terkait upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Ormas Muhammadiyah.

## 2. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti menggunakan dua pengumpulan sumber data yang berupa data primer dan data sekunder:

### 1) Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

### 2) Data Sekunder

Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat-data tersebut dapat berupa dalam bentuk dokumen-dokumen, buku, catatan, bukti otentik atau arsip-arsip (**Suryabrata, 1987, pp. 93–94**). Dalam penelitian ini sumber data sekunder dapat diperoleh melalui data-data yang tercantum di web/blog resmi MCCC, laporan kerja, media informasi terpercaya, dan arsip-arsip lainnya

## 3. Unit Analisi dan Lingkup Penelitian

Unit analisis merupakan tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran & Bougie, 2017, p. 119) Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa unit analisis adalah data yang dikumpulkan sebagai tahap analisis penelitian dalam menangkap peristiwa atau fenomena yang terjadi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Maka unit analisis dalam penelitian ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan Ormas Muhammadiyah dalam rangka percepatan penanganan wabah COVID-19 di Indonesia.

Guna memperjelas dan menudahkan maksud dari penelitian ini serta memperkecil potensi pembahasan yang menyimpang atau meluas, maka diperlukannya suatu batasan

masalah. Maka dari itu lingkup penelitian yang di bahas dalam penelitian ini, yaitu pada lingkup Ormas Muhammadiyah, dengan spesifikasi lembaga yang berkontribusi langsung dalam percepatan penanganan wabah COVID-19 di Indonesia yaitu MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer. Dimana data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti yang diperoleh langsung dari subjek atau objek penelitian. Dalam pengumpulan data ini biasanya diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Teknik-teknik tersebut digunakan untuk mendapat data yang tepat, akurat, serta komprehensif.

##### 1) Wawancara

Wawancara menurut Moleong (2016) adalah perihal bercakap-cakap dengan maksud tertentu. Dalam suatu percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban dari pertanyaan pewawancara (Moleong, 2016, p. 186).

Dalam arti lain wawancara merupakan pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi atau ide gagasan dengan cara bertanya jawab, sehingga ditemukannya sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu Esterberg dalam (Sugiyono, 2015, p. 72).

Melalui teknik pengumpulan data wawancara peneliti dapat memperoleh data dan informasi mengenai objek penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan secara *online* melalui beberapa aplikasi, melihat situasi dan kondisi selama masa pandemi COVID-19. wawancara pada penelitian ini dengan melibatkan beberapa responden yang terdiri dari

1. Muhammadiyah COVID-19 *Command Center* (MCCC) PP Muhammadiyah bidang layanan kesehatan (dr. Aldila S. Al Arfah, MMR)
2. Muhammadiyah COVID-19 *Command Center* (MCCC) PP Muhammadiyah bidang kerjasama dan advokasi (dr. Corona Rintawan, Sp.EM)

3. Muhammadiyah COVID-19 *Command Center* (MCCC) PP Muhammadiyah bidang sosial ekonomi (Bahtiar Dwi Kurniawan, S. Fil, MPA)
4. Muhammadiyah COVID-19 *Command Center* (MCCC) PP Muhammadiyah Bidang Penggalangan Dana MCCC PP Muhammadiyah (Rahmawati Husein, MCP., Ph.D.)
5. Muhammadiyah COVID-19 *Command Center* (MCCC) PP Muhammadiyah divisi desiminasi informasi dan publikasi (Budi Santoso, S.Psi)
6. Wakil Sekretaris Muhammadiyah COVID-19 *Command Center* (MCCC) PP Muhammadiyah (Deni Wahyudi Kurniawan, S.SI., MA)
7. Lazismu PP Muhammadiyah diwakilkan dengan direktur utama Lazismu PP Muhammadiyah (Edi Suryanto)
8. Anggota Bidang Kesehatan Masyarakat Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah (Virgo Sulianto Gohardi. SH)

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pedoman umum, yaitu pertanyaan yang akan dilontarkan kepada responden disiapkan terlebih dahulu secara berurutan, kemudian pertanyaan akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, serta menyesuaikan pertanyaan dengan kontekstual saat wawancara berlangsung. Dengan teknik ini peneliti akan dimudahkan dalam memperoleh data dan informasi melalui cerita atau penjabaran yang mengalir dengan sendirinya oleh responden.

## 2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta dokumen atau data-data mengenai objek penelitian yang belum dapat ditemukan dari metode sebelumnya, adapun data-data tersebut berupa catatan, buku, majalah, notulen rapat, laporan pertanggung jawaban, WEB resmi, dan dokumen lainnya (Arikunto, 2010, p. 274).

Adapun data-data dokumentasi dalam penelitian ini berasal dari akun resmi twitter BNPB, website MCCC, laporan perkembangan dan penanganan bulanan MCCC, surat edaran MCCC, website PP Muhammadiyah, pernyataan pers PP Muhammadiyah, media masa republika, media masa tribun.com dan media masa detik news. Harapannya dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi dapat mempermudah peneliti untuk memperoleh data yang

sehingga dapat melengkapi data-data yang sebelumnya belum diperoleh melalui teknik pengumpulan data wawancara serta dapat digunakan untuk *mencross check* dan falidasi data.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan proses penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi secara sistematis dengan mengorganisasikan data dan memilah bagaian-bagian data yang diperlukan dalam tahapan penelitian, selanjutnya dibuat kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh sehingga dapat mempermudah pembaca untuk memahami (Sugiyono, 2007, pp. 333–345).

Penelitian ini merupakan penellitian yang munggakan teknik analisis kualitatif. Maka dari itu menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Miles dan Hubberman dalam (Sugiyono, 2007, p. 204).

### 1) Pengumpulan data (*data collection*)

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dicatat dan dibagi menjadi dua aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data yang peroleh secara alami sesuai apa yang dilihat, didengar, dan dialami pada saat pengumpulan data tersebut berlangsung.

Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang berisikan tafsiran peneliti terhadap informan ataupun terhadap penemuan yang dijumpai pada saat pengumpulan data berlangsung yang juga merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Untuk dapat memperoleh catatan ini biasanya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

### 2) Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses seleksi atau penyederhanaan data mentah dengan cara mereduksi data dengan menfokuskan dan memperpendek isi data sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sehingga dapat menghasilkan data relevan yang menjadi suatu informasi terperinci, jelas, dan akurat untuk disiapkan dalam tahapan selanjutnya, yaitu proses penyajian data. Dengan dilakukannya reduksi data diharapkan dapat mempermudah dalam tahapan penarikan keimpulan.

### 3) Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data dapat dijelaskan dalam bentuk narasi, matrik, grafis, atau bagan sebagai isi penjelasan dari data penelitian. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian yang menggunakan teknik analisis kualitatif adalah penyajian data yang berbentuk naratif. Penyajian data berbentuk naratif berupa sekumpulan informasi dalam sebuah kalimat yang tersusun secara sistematis dan mudah untuk dipahami.

### 4) Penarikan kesimpulan (*conclusion*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data guna memahami makna dan maksud penjelasan yang diperoleh dari kumpulan data penelitian yang telah direduksi dengan cara dibandingkan anatara satu dengan yang lain sehingga dapat ditarik benang merah dari penelitian tersebut sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.